

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SISTEM
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) DAN PENANGANAN DAERAH
RAWAN PANGAN DI KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

Oleh:

Ulul Karima, Ari Subowo

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The food insecurity problem is a complex issue because it does not only concern about the availability of food itself. Adequate food supply does not automatically indicate the conditions of food security at individual and household level. This study aims to explain the results of implementation of empowerment program of Food and Nutrition Vigilance System (SKPG) and Food Insecurity Handling at Godong District Regency of Grobogan as well as finding out the challenges and bottlenecks during the implementation of the program. The method used in this research is descriptive-qualitative method. In this study, the author use William Dunn's six criteria of evaluation: effectiveness, efficiency, adequacy, equalization, responsiveness, and accuracy. The author found out that the program cannot be run optimally because the implementation program without need assessment. The program also did not meet the criteria of adequacy because the results of the program have not been able to solve the food insecurity problem, which proven by the increasing number of pre-prosperous family as much as 11.33% in 2015. Achieving equalization is yet not optimal indicated by minimal participation of groups inactivities carried out by BKP Grobogan. On the criteria of responsiveness, the program is not yet well assessed, which the needs of the target groups are not in accordance with the requirements. The accuracy of this program is also seen minimal because the target groups which are expected to have side business apparently not all of them has one.

Keywords : Food Insecurity, Food Security, Evaluation

I. PENDAHULUAN

Badan Ketahanan Pangan (Purwantini, 2014: 14) mengemukakan bahwa kerawanan pangan dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:

(a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/ rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu

rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/ rumah tangga; dan (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan, serta keterjangkauan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa kerawanan pangan dapat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan menurunnya

daya beli pangan akan memperburuk konsumsi energi dan protein masyarakat.

Di Jawa Tengah status dari aspek ketersediaan pangan menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah aman. Namun, status regional ini belum tentu pada tingkat kabupaten/ kota juga demikian. Seluruh kabupaten/ kota tersebut akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Ketersediaan Pangan

No	Kabupaten/ Kota	Populasi 2014 (Jiwa)	Produksi Bersih (Gr/Kap/hr)	Rasio Ketersediaan (r)	Skor Pertanian
1	Cilacap	1.892.650	664	2,21	1
2	Banyumas	1.674.786	347	1,16	1
3	Purbalingga	955.814	460	1,53	1
4	Banjarnegara	985.981	615	2,05	1
5	Kebumen	1.241.165	712	2,37	1
6	Purworejo	763.131	838	2,79	1
7	Wonosobo	843.645	854	2,85	1
8	Magelang	1.225.742	635	2,12	1
9	Boyolali	978.108	858	2,86	1
10	Klaten	1.246.135	615	2,05	1
11	Sukoharjo	907.876	624	2,08	1
12	Wonogiri	1.058.149	2.155	7,18	1
13	Karanganyar	867.684	784	2,61	1
14	Sragen	884.080	1.369	4,56	1
15	Grobogan	1.479.737	1.608	5,36	1
16	Blora	981.969	1.358	4,53	1
17	Rembang	692.598	1.217	4,06	1
18	Pati	1.340.549	1.310	4,37	1
19	Kudus	820.953	339	1,13	2
20	Jepara	907.888	796	2,65	1
21	Demak	1.227.951	1.126	3,75	1
22	Semarang	970.562	587	1,96	1

23	Temanggung	745.649	752	2,51	1
24	Kendal	988.748	929	3,10	1
25	Batang	793.479	602	2,01	1
26	Pekalongan	954.548	319	1,06	2
27	Pemalang	1.487.184	516	1,72	1
28	Tegal	1.608.290	454	1,51	1
29	Brebes	1.996.460	607	2,02	1
30	Kota Magelang	110.769	44	0,15	3
31	Kota Surakarta	398.926	4	0,01	3
32	Kota Salatiga	195.448	98	0,33	3
33	Kota Semarang	1.438.961	36	0,12	3
34	Kota Pekalongan	282.713	47	0,16	3
35	Kota Tegal	238.704	24	0,08	3
Jawa Tengah		35.087.032	754	2,51	

■ Aman (28) ■ Waspada (1) ■ Rawan(6)

Sumber: Laporan Tahunan SKPG Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Pada tabel 1.1, kolom rasio ketersediaan pangan dihasilkan dari produksi pangan pokok yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Rasio

ketersediaannya untuk konsumsi penduduk Jawa Tengah secara makro cukup.

Untuk melihat aspek akses pangan secara ekonomi, fisik dan sosial akan diuraikan pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Akses Pangan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga	KK Pra Sejahtera	KK Sejahtera I	KK_Pra dan Sejahtera I (Total)	% Pra & Sejahte ra I (r)	Skor Miskin
1	Cilacap	519.850	130.794	134.269	265.063	50,99	3
2	Banyumas	484.416	109.299	95.772	205.071	42,33	3
3	Purbalingga	287.939	71.844	58.112	129.956	45,13	3
4	Banjarnegara	286.266	70.726	68.977	139.703	48,80	3
5	Kebumen	357.854	92.777	74.842	167.619	46,84	3
6	Purworejo	222.238	53.630	44.073	97.703	43,96	3
7	Wonosobo	245.916	54.274	51.244	105.518	42,91	3
8	Magelang	353.720	92.743	63.378	156.121	44,14	3
9	Boyolali	296.675	98.895	48.399	147.294	49,65	3
10	Klaten	364.056	65.271	75.559	140.830	38,68	2

11	Sukoharjo	242.714	47.453	52.798	100.251	41,30	3
12	Wonogiri	328.187	49.781	60.509	110.290	33,61	2
13	Karanganyar	253.155	29.256	24.719	53.975	21,32	2
14	Sragen	262.073	65.618	89.457	155.075	59,17	3
15	Grobogan	453.269	272.242	57.381	329.623	72,72	3
16	Blora	288.146	121.764	73.741	195.505	67,85	3
17	Rembang	183.978	75.268	29.166	104.434	56,76	3
18	Pati	420.626	137.055	83.179	220.234	52,36	3
19	Kudus	229.168	23.231	40.904	64.135	27,99	2
20	Jepara	279.235	69.154	92.323	161.477	57,83	3
21	Demak	355.791	127.691	82.897	210.588	59,19	3
22	Semarang	297.193	76.407	67.873	144.280	48,55	3
23	Temanggung	224.509	53.866	28.814	82.680	36,83	2
24	Kendal	290.467	100.536	41.980	142.516	49,06	3
25	Batang	230.134	77.247	53.051	130.298	56,62	3
26	Pekalongan	259.047	52.352	60.523	112.875	43,57	3
27	Pemalang	400.915	121.145	90.032	211.177	52,67	3
28	Tegal	432.575	79.146	92.563	171.709	39,69	2
29	Brebes	554.163	152.265	126.567	278.832	50,32	3
30	Kota Magelang	33.571	4.860	6.769	11.629	34,64	2
31	Kota Surakarta	122.925	10.259	22.108	32.367	26,33	2
32	Kota Salatiga	62.398	6.926	8.741	15.667	25,11	2
33	Kota Semarang	415.526	41.788	74.932	116.720	28,09	2
34	Kota Pekalongan	77.061	11.712	14.971	26.683	34,63	2
35	Kota Tegal	69.713	11.795	17.666	29.461	42,26	3
Jawa Tengah		10.185.469	2.659.070	2.108.289	4.767.359	46,81	

■ Aman (0) ■ Waspada (11) ■ Rawan (24)

Sumber: Laporan Tahunan SKPG Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Pada tabel 1.2, yang menjadi perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah terhadap akses pangan hanya dari segi akses ekonomi saja. Akses ekonomi ini dihitung dari jumlah KK Pra dan Sejahtera I. Terlihat pada tabel 1.2, dari 35 kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah tidak ada yang berstatus aman. Sementara itu terdapat 24 kabupaten/ kota yang diindikasikan rawan. Sedangkan sisanya yaitu 11 kabupaten/

kota terindikasikan dalam status waspada akses pangan.

Dilihat dari data yang ada, wilayah Kabupaten Grobogan dalam aspek ketersediaan pangan memiliki rasio ketersediaan pangan paling tinggi dibanding daerah lain, yaitu sebesar 5,36. Namun, pada aspek akses pangan yang dilihat dari data analisis SKPG Jawa Tengah tahun 2015 memiliki angka kerawanan yang paling tinggi yaitu 72,72.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi di mana ketersediaan pangan cukup tetapi tidak ada kemampuan untuk memperoleh pangan.

Lokus yang akan menjadi tempat penelitian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kecamatan Godong memiliki 28 desa yang merupakan jumlah desa terbanyak dibanding kecamatan lainnya dengan jumlah kemiskinan 62%. Masyarakat di Kecamatan Godong dalam

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena

III. Hasil Penelitian

Pembahasan dalam program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan pangan di Kecamatan Godong, peneliti menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan melalui data primer dan data sekunder yang telah didapatkan. Hasil penelitian ini akan diuraikan menjadi 6 kriteria menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. setelah itu peneliti akan

akses fisik terhadap pangan dapat menjangkau pangan dengan mudah karena adanya dukungan prasarana dan sarana mobilitas maupun pasar yang memadai. Sedangkan aspek sosialnya memang belum terdapat sebuah sistem perlindungan sosial yang membantunya mendapatkan pangan pada saat mengalami kekurangan karena di Kecamatan Godong ketersediaan pangannya pun masuk dalam kategori sangat tahan pangan. Kecamatan Godong juga relatif aman dari bencana alam yang dapat menyebabkan rawan pangan transien apabila dibandingkan dari kecamatan lainnya.

tujuannya adalah mendeskripsikan, menggambarkan berjalannya suatu program untuk mengatasi permasalahan.

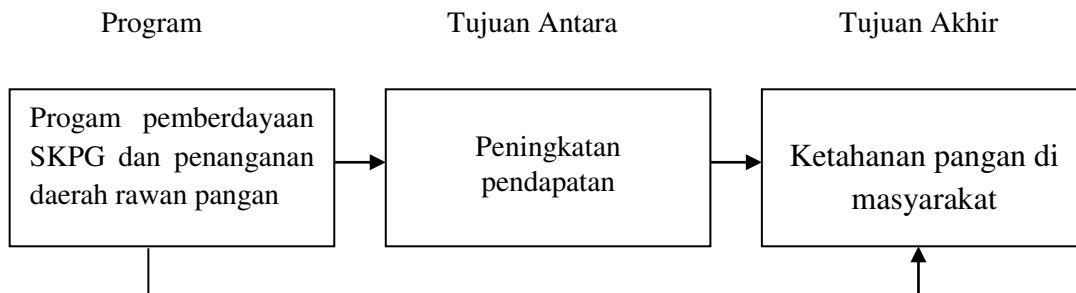
menganalisis secara makro dari hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan.

1. Hasil Pelaksanaan Program

A. Efektivitas

Mekanisme pencapaian tujuan dari program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan pangan di Kecamatan Godong di tampilkan pada gambar 4.1

Gambar 4.1
Mekanisme Pencapaian Tujuan



Sumber: Tjokrowinoto (2007:133), diolah

Untuk mencapai tujuan akhir yaitu ketahanan pangan di masyarakat maka harus mencapai tujuan antara terlebih dahulu yaitu dengan peningkatan pendapatan. Untuk mencapai tujuan antara tersebut melakukan pelatihan-pelatihan pengolahan hasil pangan. Mekanisme pelatihan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan yaitu perwakilan kelompok sasaran dari berbagai daerah diundang untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Bentuk pelatihan tersebut adalah dengan memperlihatkan cara-cara pembuatan dan praktik langsung. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok sasaran tersebut membagi ilmunya kepada kelompoknya masing-masing untuk diterapkan. Harapan dari hasil pelatihan tersebut adalah kelompok sasaran mempunyai usaha sampingan, namun yang ditemui di lapangan, kelompok wanita tani Kecamatan Godong sama sekali tidak mempunyai usaha sampingan.

Proses pelatihan memang berjalan, namun masih ada kelemahan-kelemahan mendasar terhadap proses pelatihan tersebut. Pertama, tidak adanya kemanfaatan program. Kedua, tidak adanya *need assessment* atau penggalan kebutuhan terhadap materi-materi pelatihan.

B. Efisiensi

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan pangan terdapat 5 pegawai. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, BKP Kabupaten Grobogan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten, dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menambah pegawai tetap. Dilihat dari jenjang pendidikannya (S-1 berjumlah 3 orang dan S-2 berjumlah 2 orang), kelima pegawai tersebut dinilai berkompeten. Begitu juga dengan sarana prasarana, BKP juga melibatkan pihak ketiga untuk mencukupi kebutuhan sarana

prasarana saat melaksanakan kegiatan namun, meskipun begitu sarana prasarana belum juga terpenuhi.

Dalam penentuan waktu kegiatan pelatihan keterampilan untuk kelompok sasaran di Kecamatan Godong, BKP Kabupaten Grobogan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kelompok sasaran yang mayoritas petani, yaitu dengan melaksanakan kegiatan di luar masa panen dan masa penanaman. Sehingga kelompok sasaran dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai petani. Penentuan waktu kegiatan menjadi sangat penting bagi organisasi pelaksana, karena program yang baik adalah program yang mengerti dan dapat menjawab kebutuhan dari kelompok sasaran.

C. Kecukupan

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Godong adalah tidak adanya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan pada tingkat rumah tangga. Bahkan KK pra sejahtera meningkat 11,33% dari tahun 2014 ke tahun 2015. Itu artinya program ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Pemerintah dalam upaya perumusan sebuah program tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan itu saja, dimana kegiatannya adalah melakukan pelatihan dan penyaluran bantuan alat

produksi. Karena kegiatan tersebut tidak akan pernah cukup untuk melakukan upaya-upaya menangani kerawanan pangan, karena aspek kerawanan pangan itu merupakan aspek yang multidimensi, tidak hanya bicara tentang ketersediaan tetapi apakah masyarakat dapat mengaksesnya atau tidak. Untuk mengatasinya seharusnya ada keterkaitan program antar SKPD, seperti dari dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi, dinas pertanian, dinas pendidikan. Alasan ekonomi yang menjadi permasalahan utama terhadap akses pangan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatasinya.

D. Perataan

Kelompok sasaran program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan pangan di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ada dua, yaitu kelompok wanita tani dan kelompok usaha bersama. Dalam setiap pelatihan yang diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan tiap kelompok mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan. Tidak semua anggota kelompok dapat mengikutinya, hanya akan ada dua atau tiga orang saja sebagai delegasinya. Setelah itu hasil yang didapat oleh para delegasi inilah dibagikan kepada anggota lain. Jadi, tidak semua anggota kelompok mendapatkan ilmunya secara langsung.

Untuk masalah bantuan alat produksi, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan mulai tahun 2014 memberikan bantuan berdasarkan proposal pengajuan yang diajukan ke Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. Jadi tergantung dari masyarakat mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan atau tidak. Namun, di lapangan juga masih ditemukan bahwa bantuan alat produksi ada yang diberikan langsung dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan tanpa pengajuan.

Hal yang menjadi sorotan bagi peneliti dalam kriteria perataan adalah mengenai kegiatan pelatihan yang hanya mengirimkan delegasi saja. Temuan di lapangan yang terjadi adalah ilmu tersebut tidak terbagi secara merata di kelompok sasaran karena delegasi yang dikirim tidak cukup menguasai materi. Pada kriteria perataan ini kemanfaatan program tidak dirasakan oleh kelompok sasaran secara merata.

E. Responsivitas

Suatu organisasi dinilai gagal apabila tidak menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu program. Dalam kriteria responsivitas peneliti menemukan bahwa pelatihan dan penyaluran bantuan untuk kelompok wanita tani tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti bantuan perajangan ketela yang

diberikan kepada kelompok wanita tani, padahal harga ketela di Kecamatan Godong mahal, sehingga alat tidak terpakai.

Kejadian seperti itu sebenarnya adalah sesuatu yang dapat dihindari dan dapat dicegah. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dimana dalam program ini adalah kegiatan pelatihan dan penyaluran bantuan, sangat penting jika kelompok sasaran diajak untuk ikut serta, karena merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi. Tidak adanya koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana dan penerima manfaat dinilai sebagai kegagalan organisasi pelaksana untuk menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu program.

F. Ketepatan

Hasil yang dari kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan adalah kelompok sasaran mempunyai usaha sampingan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Namun kenyataannya tidak semua kelompok sasaran mempunyai usaha sampingan. Kelompok sasaran wanita tani tidak dapat mengembangkan pelatihan yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan karena dinilai tidak sesuai dengan potensi mereka. Kelompok wanita tani merasa

kesulitan dalam pemasaran produk olahan pangan tersebut. Sedangkan bagi kelompok usaha bersama, pelatihan yang diberikan dapat dimanfaatkan karena orang-orang yang tergabung dalam kelompok usaha bersama ini memang berfokus pada usaha olahan pangan, sehingga mereka sangat terbantu dengan adayan kegiatan pelatihan dan bantuan alat produksi.

Kelompok sasaran yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan alat wajib mengirimkan hasilnya (produknya) setiap tiga bulan sekali. Hal tersebut sebagai bentuk kontrol dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. Apabila kelompok tersebut tidak mengirimkan hasilnya maka bantuan alat tersebut dapat ditarik kembali oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. Namun, yang terjadi di lapangan, pada kelompok wanita tani, control tersebut tidak berjalan, dan alat yang sudah terbengkelai juga dibiarkan begitu saja.

2. Hambatan Pelaksanaan Program

5 Efektivitas

1. Tidak adanya *need assessment* atau penggalian kebutuhan ke kelompok sasaran, sehingga kegiatan pelatihan dan bantuan alat produksi tidak memberikan kemanfaatan kepada kelompok sasaran. Padahal sangat penting jika kelompok sasaran diajak untuk ikut serta,

karena merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi.

2. Mekanisme kontrol kepada kelompok sasaran yang telah menerima pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi tidak dilakukan berkala, yang awalnya tiga bulan sekali menjadi tidak dilakukan sama sekali.

6 Efisiensi

1. Kurangnya komitmen dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan terhadap program pemberdayaan SKPG dan penanganan kerawanan pangan di Kecamatan Godong. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pendampingan di lapangan setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan. Sehingga yang terjadi adalah inefisiensi karena apa yang telah diupayakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, di kelompok sasaran tidak terpakai atau tidak membuahkan hasil.
2. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelatihan, sehingga peserta pelatihan dalam praktek langsung tidak dapat optimal. Meskipun sudah bekerjasama

dengan pihak ketiga, namun hal tersebut masih kurang dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan.

7 Kecukupan

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan kerawanan pangan. Kerawanan pangan merupakan aspek yang multidimensi, tidak hanya bicara tentang ketersediaan tetapi apakah masyarakat dapat mengaksesnya atau tidak. Program ini dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan utama yang ada sehingga dibutuhkan koordinasi antar SKPD.
2. Tidak adanya materi pendukung setelah usaha tersebut berjalan, sehingga usaha beberapa kelompok sasaran tidak dapat bertahan lama.
3. Kegiatan pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan belum cukup untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang disebabkan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat.

8 Perataan

Mekanisme kegiatan pelatihan tidak dapat diikuti oleh seluruh kelompok sasaran, mereka hanya dapat mendelegasikan beberapa perwakilan saja.

Sehingga ilmu yang didapat dari kegiatan pelatihan tidak merata secara optimal pada kelompok sasaran.

9 Responsivitas

1. Tidak ada mekanisme dari organisasi pelaksana kepada kelompok sasaran untuk mengekspresikan kebutuhannya. Padahal merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi.
2. Tidak adanya koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana dan penerima manfaat sehingga organisasi pelaksana belum mampu menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kegiatan pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kesalahan dalam materi kegiatan pelatihan dan penyaluran alat produksi.

10 Ketepatan

1. Materi kegiatan pelatihan olahan bahan pangan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan potensi dari kelompok sasaran, sehingga tidak dapat berkembang.

2. Masih ada penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran yang dilakukan langsung tanpa koordinasi sehingga ada beberapa bantuan yang tidak tepat.

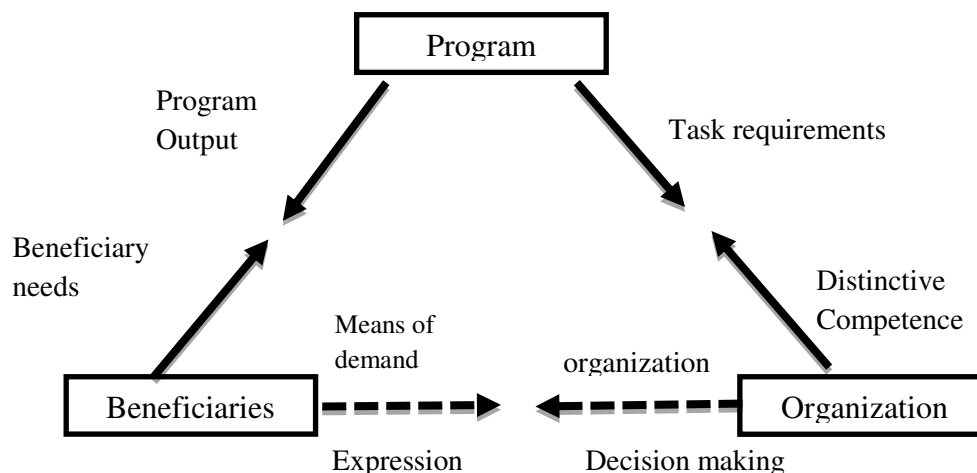
- **Penanganan Kerawanan Pangan di Kecamatan Godong**

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban untuk mengatasi masalah

ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan melalui intervensi program-program perwujudan ketahanan pangan. Agar keberhasilan program dapat tercipta harus ada hubungan yang erat antara tiga komponen, yaitu program, organisasi pelaksana dan penerima manfaat program. Skematis teori David Korten dapat dilihat berikut ini:

Gambar 4.2

Three Way Fit Theory



Sumber : Moeljarto Tjokrowinoto, 2007:136

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan pangan di Kecamatan Godong terlihat belum ada kesesuaian antara 3 unsur tersebut, yaitu program, organisasi pelaksana dan penerima manfaat. Hal tersebut terlihat tidak adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh penerima manfaat selain itu tidak adanya *need assessment* dari organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Belum ada

sebuah mekanisme dimana kelompok sasaran tersebut dapat mengekspresikan kebutuhannya. Program pemberdayaan SKPG dan penanganan daerah rawan di Kecamatan Godong dengan konsep pelatihan dan bantuan alat produksi dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada karena KK miskin pun malah mengalami penambahan sekitar 11,33 %.

Pemerintah dalam upaya perumusan sebuah program tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan itu saja yaitu pelatihan dan bantuan alat produksi, karena kegiatan itu tidak akan pernah cukup untuk melakukan upaya-upaya kerawanan pangan, karena aspek kerawanan pangan itu merupakan aspek yang multidimensi, tidak hanya bicara tentang ketersediaan, tapi apakah masyarakat juga bisa membelinya atau tidak. Kerawanan pangan di Kecamatan Godong adalah mengenai permasalahan kemampuan untuk membeli pangan atau *ability to pay* (ATP). Sementara keinginan untuk membeli atau *willingness to pay* (WTP) di Kecamatan Godong sudah ada. Harapannya dari program pemberdayaan SKPG dan penanganan kerawanan pangan di Kecamatan Godong adalah ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk membeli. Kemauan dan kemampuan adalah dua hal yang berbeda. Lebih baiknya adalah mereka mau dan mampu. Sebuah program yang baik adalah membidik ATP dan juga WTP. Di Kecamatan Godong sendiri WTP nya sudah ada namun ATP nya belum ada. ATP inilah yang akan dibidik oleh proses pemberdayaan. Kemampuan membeli atau ATP menjadi penting karena kelompok yang kemampuannya atau ATPnya terbatas tentu saja kesempatan memilikinya

juga terbatas. Kemiskinan adalah yang menjadi alasan utama tidak adanya ATP di masyarakat Kecamatan Godong.

Kemampuan atau *ability* dari masyarakat ini apabila tidak diatasi akan menyebabkan timbulnya masalah seperti gizi buruk. Selain itu dalam suatu Negara apabila terjadi kerawanan pangan maka kestabilan ekonomi, politik dan sosial akan terguncang. Untuk memperkuat ATP di masyarakat terhadap pangan dalam jangka panjang, perlu adanya upaya yang dilakukan melalui (Ariningsih dan Rachman, 2008:53) :

- a. Menjaga stabilitas harga pangan;
- b. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan;
- d. Peningkatan efektivitas program raskin; dan
- e. Penguatan lembaga pengelola pangan di perdesaan.

Pemerintah dalam upaya penanganan kerawanan pangan tidak hanya bisa mengandalkan satu program saja. Diperlukan juga sinkronisasi dan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu saja juga antar SKPD. Masalah kerawanan pangan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan saja melainkan juga harus

memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitas peningkatan akses terhadap pangan, baik di tingkat rumah

tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Hasil Pelaksanaan Program

- **Efektivitas**

Kegiatan pelatihan olahan pangan dan penyaluran bantuan alat produksi yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan kepada kelompok sasaran agar memiliki usaha sampingan untuk meningkatkan pendapatan belum dapat terpenuhi. Terutama pada kelompok sasaran wanita tani, mereka sama sekali tidak mempunyai usaha sampingan.

- **Efisiensi**

1. Proses kegiatan pelatihan olahan pangan dan penyaluran bantuan alat produksi masih belum tepat sehingga banyak materi pelatihan dan bantuan alat yang tidak dapat digunakan oleh kelompok sasaran.
2. Selama pelaksanaan kegiatan pelatihan, alat yang disediakan bagi peserta pelatihan masih terbatas.

Sehingga dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencukupi kekurangan tersebut.

3. Penentuan waktu kegiatan disesuaikan dengan kelompok sasaran yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yaitu menghindari masa panen dan penanaman.

- **Kecukupan**

1. Masih terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 11,33% pada tahun 2015 yang artinya masyarakat Kecamatan Godong yang tidak dapat mengakses pangan jumlahnya bertambah.
2. Kegiatan pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan dinilai belum cukup untuk mengatasi kerawanan pangan di Kecamatan Godong.

- **Perataan**

1. Mekanisme kegiatan pelatihan olahan pangan hanya berupa perwakilan tiap kelompok sasaran. Sehingga kegiatan pelatihan olahan pangan tidak dapat dirasakan secara merata oleh kelompok sasaran.

2. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan mulai tahun 2014 terdapat mekanisme baru dalam penyaluran bantuan alat produksi yaitu berdasarkan proposal pengajuan yang diajukan oleh kelompok sasaran. Namun mekanisme ini belum berjalan secara merata, masih ada kelompok sasaran yang mendapatkan bantuannya langsung tanpa pengajuan.

- **Responsivitas**

1. Responsivitas Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan pada kelompok wanita tani berjalan dengan kurang koordinasi sehingga masih terdapat materi pelatihan dan penyaluran bantuan alat produksi yang tidak sesuai. Seperti halnya di

Kecamatan Godong terdapat pelatihan olahan pangan berbahan dasar ketela, padahal ketela di Kecamatan Godong harganya mahal. Sehingga pelatihan dan bantuan alat perajang yang diterima tidak dapat digunakana oleh kelompok sasaran.

2. Tidak diikutkannya partisipasi dari kelompok sasaran dalam penyusunan materi kegiatan pelatihan. Padahal keikutsertaan kelompok sasaran dirasa sangat diperlukan karena merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi.

- **Ketepatan**

Kelompok sasaran wanita tani tidak dapat mengembangkan pelatihan yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan karena dinilai tidak sesuai dengan potensi mereka. Kelompok wanita tani merasa kesulitan dalam pemasaran produk olahan pangan tersebut. Sedangkan bagi kelompok usaha bersama, pelatihan yang diberikan dapat dimanfaatkan karena orang-

orang yang tergabung dalam kelompok usaha bersama ini memang berfokus pada usaha olahan pangan.

B. Hambatan Pelaksanaan Program

• Efektivitas

1. Tidak adanya *need assessment* atau penggalian kebutuhan ke kelompok sasaran, sehingga kegiatan pelatihan dan bantuan alat produksi tidak memberikan kemanfaatan kepada kelompok sasaran. Padahal sangat penting jika kelompok sasaran diajak untuk ikut serta, karena merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi.
2. Mekanisme kontrol kepada kelompok sasaran yang telah menerima pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi tidak dilakukan berkala, yang awalnya tiga bulan sekali menjadi tidak dilakukan sama sekali.

• Efisiensi

1. Kurangnya komitmen dari Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Grobogan terhadap program pemberdayaan SKPG dan penanganan kerawanan pangan di Kecamatan Godong. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pendampingan di lapangan setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan. Sehingga yang terjadi adalah inefisiensi karena apa yang telah diupayakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, di kelompok sasaran tidak terpakai atau tidak membuahkan hasil.

2. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelatihan, sehingga peserta pelatihan dalam praktek langsung tidak dapat optimal. Meskipun sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, namun hal tersebut masih kurang dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan.

• Kecukupan

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan kerawanan pangan. Kerawan pangan

merupakan aspek yang multidimensi, tidak hanya bicara tentang ketersediaan tetapi apakah masyarakat dapat mengaksesnya atau tidak. Program ini dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan utama yang ada sehingga dibutuhkan koordinasi antar SKPD.

2. Tidak adanya materi pendukung setelah usaha tersebut berjalan, sehingga usaha beberapa kelompok sasaran tidak dapat bertahan lama.
3. Kegiatan pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan belum cukup untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang disebabkan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat.

- **Perataan**

Mekanisme kegiatan pelatihan tidak dapat diikuti oleh seluruh kelompok sasaran, mereka hanya dapat mendelegasikan beberapa perwakilan saja. Sehingga ilmu yang didapat dari kegiatan pelatihan tidak merata

secara optimal pada kelompok sasaran.

- **Responsivitas**

1. Tidak ada mekanisme dari organisasi pelaksana kepada kelompok sasaran untuk mengekspresikan kebutuhannya. Padahal merekalah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang terjadi.
2. Tidak adanya koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana dan penerima manfaat sehingga organisasi pelaksana belum mampu menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kegiatan pelatihan olahan pangan dan bantuan alat produksi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kesalahan dalam materi kegiatan pelatihan dan penyaluran alat produksi.

- **Ketepatan**

1. Materi kegiatan pelatihan olahan bahan pangan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan

potensi dari kelompok sasaran, sehingga tidak dapat berkembang.

2. Masih ada penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran yang dilakukan langsung tanpa koordinasi sehingga ada beberapa bantuan yang tidak tepat.

2. Saran

1. Dibuat sebuah mekanisme untuk menggali kebutuhan dari kelompok sasaran. Misalnya membuat forum *group discussion* pada setiap kecamatan yang dihadiri oleh setiap perwakilan kelompok sasaran.
2. Sebaiknya kontrol dilakukan berkala oleh organisasi pelaksana untuk melihat sejauhmana kemanfaatan program. Jika di lapangan terdapat masalah dapat ditangani dengan segera. Apalagi mengenai alat-alat produksi yang tidak terpakai dapat ditarik kembali dan disalurkan kepada kelompok sasaran yang lebih membutuhkan.
3. Sinkronisasikan program yang berkaitan antar SKPD untuk menangani kerawanan pangan agar program dapat memenuhi kriteria merata, cukup dan tepat. Karena yang terjadi di lapangan,

terdapat program yang sama antara Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, yaitu sama-sama mengadakan pelatihan dengan kelompok sasaran yang sama yaitu pada kelompok usaha bersama.

4. Sebaiknya dilakukan pembinaan kepada pelaksana program untuk membangun komitmen dalam mengemban tugas yang disertai dengan sistem *reward and punishment* yang tepat.
5. Sebaiknya kegiatan pelatihan yang diadakan tidak hanya diikuti oleh perwakilan saja. Namun diikuti oleh seluruh kelompok sasaran. Organisasi pelaksana dapat mengadakan pada saat ada pertemuan rutin bulanan di kelompok sasaran baik kelompok wanita dan kelompok usaha bersama.
6. Adakan pendampingan berkala kepada kelompok sasaran agar hasil dari pelatihan dapat terarah untuk mencapai tujuan program.
7. Kebanyakan rumah di Kecamatan Godong mempunyai pekarangan yang luas, hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan ditanami

tanaman yang menguntungkan dari segi ekonomi maupun untuk konsumsi sendiri.

8. Untuk meningkatkan kemampuan membeli (*ability to pay*), organisasi pelaksana harus mampu mengintervensi dalam hal

stabilitas harga, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, pemberdayaan, peningkatan efektivitas program raskin, dan penguatan lembaga pengelola pangan di perdesaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ariani, Mewa. (2016). Upaya Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Mendukung Ketahanan Pangan. Dalam Pasandaran, Effendi dan kawan-kawan (eds.), *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan* (225 - 244). Jakarta: IAARD Press

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. (2011). *Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021*. Grobogan: BKP Kabupaten Grobogan

Badan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah. (2015). *Laporan Tahunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah*. Ungaran: BKP Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2016). Kabupaten Grobogan dalam Angka 2016. Grobogan: BPS Kabupaten Grobogan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2015). Kabupaten Grobogan dalam Angka 2015.

Grobogan: BPS Kabupaten Grobogan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2016). Kecamatan Godong dalam Angka 2016. Grobogan: BPS Kabupaten Grobogan.

Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (2d ed.) Gadjah Mada University Press.

Moelong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Saliem, Handewi Purwati. (2005). *Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapi, Farida Yusuf. (2008). *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *"Pembangunan: Dilema dan Tantangan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS

Regulasi:

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016

Jurnal:

Purwantini, Tri Bastuti. (2014). *Pendekatan Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Volume 32 No. 1, Juli 2014: 1 – 17

Ariningsih, Ening, Rachman Handewi. (2008). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Volume 6 No. 3, September 2008: 239 - 255

Internet:

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/06/oky9ap368-toko-tani-indonesia-pangkas-5-rantai-distribusi> [diakses 17 Februari 2017]